

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengatur dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara herarki Rencana Kerja berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 Tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daaerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada :

- Renstra Perangkat Daerah,
- Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu,
- Hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 hasil review yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran, serta Perkiraan Maju pendanaan;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar;

3. Memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi, dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025;
4. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD tahun 2024.

1.1.1 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan rencana kerja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sementara penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2024.

1.1.2 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar juga berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar. Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar

penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Rencana Kerja. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 harus berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 – 2026 hasil review.

1.1.3 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Sekretariat DPR RI serta DPRD Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Rencana Kerja Sekretariat DPR RI dan Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Program DPR RI dan DPRD provinsi Jawa Timur yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Rencana Kerja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor ... Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 serta disusun dan mengacu pada RKPD Tahun 2025, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai

pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu. Berisikan tentang :

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar,

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar,

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar,

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

2.5. Penelaahan Usulan program, kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Menguraikan mengenai :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Sub Bab ini menyajikan Tabel Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang garis besar mengenai rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2025 dan

perkiraan maju tahun 2026 berdasarkan hasil analisis bab-bab sebelumnya.

BAB V : Penutup

Menguraikan tentang :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan,
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan dan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar disajikan sebagai salah satu fungsi untuk peningkatan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar di tahun yang direncanakan dengan mengacu pada hasil kinerja tahun lalu guna mengetahui :

1. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 2. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 3. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan atau melebihi target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 5. Implikasi atau suatu akibat yang timbul terhadap capaian target program Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar;
 6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut pada poin 5.
- 2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar serta hambatan dan permasalahan yang harus dihadapi sekaligus pengambilan sikap sebagai tindakan solusinya.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD kota Blitar tahun lalu (2022) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2023) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPRD Kota Blitar berdasarkan realisasi Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun – tahun sebelumnya.

Adapun program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 1. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
6. Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sedang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n - 1) adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan /atau naskah akademik
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
 4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
 5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Pendalaman Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Orientasi DPRD
 3. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 6. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
 5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
 6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sebagai fasilitator Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD maka Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Renstra 2021-2026 menetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD”. Dari Tujuan yang telah ditetapkan maka Sasaran yang ingin diwujudkan adalah :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Penganggaran Daerah
3. Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun lalu (tahun 2022) dan tahun berjalan (tahun 2023) serta tahun yang direncanakan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.02.2.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20	-	5	5	100%	5	10	50,00%
4.02.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40	-	10	10	100%	10	20	50,00%
4.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	4	-	1	1	100%	1	2	50,00%
4.02.02.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib yang disusun	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	80,74%	100%	100%	100%	100%	280,74%	280,74%
4.02.02.2.04.01	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1	-	0	0	0%	1	1	100,00%
4.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	24	-	6	6	100%	6	12	50,00%
4.02.02.2.04.04	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	28	-	7	7	100%	7	14	50,00%
4.02.02.2.04.05	Sub Kegiatan Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	16	-	4	4	100%	4	8	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.02.2.04.07	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	4	-	1	1	100%	1	2	50,00%
4.02.02.2.04.08	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumen Dewan	Jumlah dokumen untuk publikasi dan dokumentasi program/kegiatan DPRD dalam 1 tahun	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4.02.02.2.08.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.02.2.08.02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	4	-	1	1	100%	1	2	50,00%
4	Unsur pendukung urusan pemerintahan									
4.02	Sekretariat DPRD									
	Tujuan : Meningkatkan kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	82	80	80,5	90,125	112%	81	251,25	306,40%
	Sasaran : Meningkatkan fasilitasi fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	82	80	80,5	90	112%	81	251	306,10%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%
4.02.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4.02.02.2.03.07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.02.2.03.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4.02.02.2.05.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	275	-	75	75	100%	50	125	45,45%
4	Unsur pendukung urusan pemerintahan									
4.02	Sekretariat DPRD									
	Tujuan ; Meningkatkan tata Kelola perangkat daerah	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	82	-	80,5	90,125	112%	81	171	208,84%
	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (86,5)	-	A(85)	A(82,39)	96,92%	A (85,5)	A	95,24%
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	-	80,5	90,1	112%	81	171	208,66%
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	98,36%	100%	100%	100%	100%	298,36%	298,36%
4.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	35	-	7	7	100%	14	21	60,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	95,13%	100%	100%	100%	100%	295,13%	295,13%
4.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	-	25	23	92%	25	48	48,00%
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitrase kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	75%	100%	100%	100%	100%	275%	275,00%
4.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100	-	25	23	92%	25	48	48,00%
4.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	-	25	25	100%	25	50	50,00%
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	90%	100%	100%	100%	100%	290%	290,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	88	-	22	22	100%	22	44	50,00%
4.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	212	-	53	53	100%	53	106	50,00%
4.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	156	-	39	39	100%	39	78	50,00%
4.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	40	-	10	10	100%	10	20	50,00%
4.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	192	-	48	48	100%	48	96	50,00%
4.02.01.2.06.08	Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	97,51%	100%	96%	96%	100%	294%	293,51%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5	-	0	0	0%	2	2	40,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	263	-	218	1	0%	0	1	0,38%
4.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	96	-	24	12	50%	24	36	37,50%
4.02.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	30	-	0	0	0%	0	0	0,00%
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	75%	100%	100%	100%	100%	275%	275,00%
4.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	75%	100%	100%	100%	100%	275%	275,00%
4.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	116	-	29	29	100%	29	58	50,00%
4.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	356	-	89	89	100%	89	178	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	52	-	13	9	69%	13	22	42,31%
4.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	304	-	76	76	100%	76	152	50,00%
4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	75%	100%	100%	100%	100%	275%	275,00%
4.02.01.2.15.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	100	-	25	25	100%	25	50	50,00%
4.02.01.2.15.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	56	-	14	14	100%	14	28	50,00%
4.02.01.2.15.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	100	-	25	25	100%	25	50	50,00%

Keterangan:

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Blitar di atas, terdapat penjabaran mengenai:

1. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, terdiri atas:
 - a) Sub Kegiatan Orientasi DPRD
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - d) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - e) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, terdiri atas:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 - 5) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
 - 6) Sub Kegiatan Pendalaman tugas DPRD
 - 7) Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli
 - 8) Sub Kegiatan Penyediaan tenaga ahli fraksi
 - 9) Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD
 - 10) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumen Dewan
 - 11) Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
 - 12) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 13) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 - 14) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 15) Sub Kegiatan Pembahasan APBD

- 16) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
- 17) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 18) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 19) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 20) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
- 21) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
- 22) Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 23) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 24) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
- 25) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
- 26) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 27) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
- 28) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
- 29) Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu
- 30) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan
Konsultasi SKPD
- 31) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
- 32) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 33) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional dan Lapangan
- 34) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 35) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan
lainnya
- 36) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
DPRD

- 37) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 38) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 3. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target pada tahun 2023 sebesar 80,5 dengan realisasi sebesar 90,1 diperoleh dari nilai rata-rata e-sukma 3 bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan, dan Bagian Pengawasan dan Penganggaran.
- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, dan atau melebihi target kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Orientasi DPRD.
Disebabkan karena tidak ada Orientasi DPRD pada tahun 2023.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Disebabkan karena pada tahun 2023 jumlah ASN berkurang dari 25 menjadi 23.
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
Disebabkan karena pada tahun 2023 jumlah ASN berkurang dari 25 menjadi 23.
 - d) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
Disebabkan karena pada tahun 2023 untuk efisiensi anggaran, pengadaan hanya 1 item yaitu sofa di ruang pimpinan DPRD.
 - e) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Disebabkan karena efisiensi anggaran pada tahun 2023 target yaitu 24 unit, realisasi sebesar 12 unit.
 - f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
Disebabkan karena realisasi target sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2023.

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian target Program Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Keberhasilan capaian Program dan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota akan mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD Kota Blitar. IKM Sekretariat DPRD merupakan nilai rata-rata dari 3 Bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan, dan Bagian Pengawasan dan Penganggaran. Sedangkan untuk tujuan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yaitu “Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD” dan “Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran Daerah” akan mendukung Indeks Kinerja Utama (IKU) dari Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Kebijakan untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dalam menjawab permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025, antara lain :

1. Mengawal dan menjaga konsistensi rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaannya tepat waktu.
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dan meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan peran bagian-bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar

Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang tercantum dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022, yaitu:

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar antara lain adalah :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Dilihat dari fungsi Sekretariat DPRD maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Sekretariat DPRD terbagi atas 2 jenis yaitu :

1. Fungsi Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD,
2. Fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi DPRD terhadap dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yaitu : Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, dan Pengawasan

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi diatas Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai unsur pelayanan dan fasilitator tugas dan fungsi dewan, maka keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan rencana kerja yang akan dilaksanakan. Untuk itu sebagai bahan evaluasi dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar, maka ditetapkan target tingkat capaian kinerja pelayanan yang dijadikan tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pencapaian pelayanan kinerja secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Blitar Tahun 2022-2026

NO	INDIKATOR	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	DIISI INDIKATOR IKU/IKK/SPM SESUAI PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026 TABEL 4.1 DAN TABEL 4.2	TULIS KETERANGAN SESUAI KATEGORI INDIKATOR	DIISI TARGET TAHUN 2022 SESUAI TABEL 4.1 PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026	DIISI TARGET TAHUN 2023 SESUAI TABEL 4.1 PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026	DIISI TARGET TAHUN 2024 SESUAI TABEL 4.2 PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026	DIISI TARGET TAHUN 2025 SESUAI TABEL 4.2 PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026	DIISI TARGET TAHUN 2026 SESUAI TABEL 4.2 PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026	DIISI REALISASI TAHUN 2022	DIISI REALISASI TAHUN 20203	DIISI REALISASI TB TAHUN 2024/ PROYEKSI REALISASI TAHUN 2024	DIISI PROYEKSI REALISASI TAHUN 2025	DIISI PROYEKSI I REALISASI TAHUN 2025	LAKUKAN ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan Kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD diukur dari kualitas pelayanan terhadap unsu-unsur sebagai berikut : - Fasilitasi Pembahasan Raperda merupakan fasilitasi pembahasan Raperda yang berasal dari prakarsa DPRD atau prakarsa eksekutif sesuai Propemperda - Peningkatan Kapasitas DPRD merupakan fasilitasi bimbingan teknis yang diikuti oleh anggota DPRD dalam satu tahun - Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD diperoleh dari hasil survey pengawasan penggunaan anggaran (rapat dengar pendapat umum/monev /rapat Alat Kelengkapan DPRD, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan pelaksanaan reses - Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari survey pada pembahasan Pertanggungjawaban APBD, KUA-PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Perubahan APBD dan Pembahasan APBD	80	80,5	81	81,5	82	80	90,125	81	81,5	82	Antara target dan realisasi rata-rata sama kecuali pada tahun 2023 dimana survey dilakukan menggunakan aplikasi e-sukma dengan realisasi melebihi target, meskipun melebihi target tetapi target berikutnya tidak dinaiikan hal tersebut dikarenakan survey akan dilakukan pada anggota DPRD yang baru

NO	INDIKATOR	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitas pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	Indikator yang mengukur kepuasan masyarakat/ pihak penerima layanan (anggota DPRD) terhadap kualitas layanan/fasilitas pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80	80,5	81	81,5	82	80	90,25	81	81,5	82	
	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	80	80,5	81	81,5	82	80	90	81	81,5	82	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (85)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	A (85,06)	A (82,39)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	Realisasi Nilai SAKIP rata-rata juga hampir sama dengan target

Pada Tabel 2.2. diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai unsur pelayanan dan fasilitator untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dapat dikatakan berhasil, bahkan dari hasil survey e-sukma perolehan Indeks kualitas fasilitas Sekretariat DPRD bagi peningkatan Kinerja DPRD jauh melebihi target. Akan tetapi meskipun telah melampaui target tidak merubah target yang ada di Renstra hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 akan dilantik anggota DPRD yang baru untuk masa periode 2024-2029. Dalam hal ini kedepan Sekretariat DPRD Kota Blitar akan tetap meningkatkan kinerjanya agar tercapai target yang lebih baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar

Capaian kinerja sampai dengan Tri bulan I (Bulan Januari sampai dengan Maret 2024) secara keseluruhan telah terealisasi anggaran sebesar 19,41% dan untuk capaian kinerja sebesar 19,47 %. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sampai dengan Tribulan I Tahun 2024 (Januari s/d April) adalah :

1. Tugas Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah sebagai fasilitator yang melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD. Konsistensi dalam pelaksanaan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DPRD sangat mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja.
2. Ada beberapa kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada Tribulan II sampai dengan tribulan IV.

Adapun Isu – isu strategis yang digunakan sebagai catatan dalam menentukan perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan mengacu pada tujuan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yaitu “ Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD” dan “Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran Daerah” adalah :

- a. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b. Belum adanya kesepahaman persepsi antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD utama dalam menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengelolaan sistem informasi dengan berbasis teknologi belum dapat dilakukan secara optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Dalam proses rancangan perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setuju di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, ada beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang

telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan jumlah anggaran untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 9.167.032.534	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 8.631.529.554	Menyesuaikan Pagu Anggaran yang ada
4.02.02.1.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	Rp 3.148.290.900	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	Rp 2.126.152.000	
4.02.02.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	Rp 170.422.300	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	Rp 156.224.200	
4.02.02.1.01.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan	10	Rp 2.427.416.600	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan	10	Rp 1.483.178.800	
4.02.02.1.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	Rp 120.600.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	Rp 120.394.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.02.1.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2	Rp 75.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2	Rp 75.000.000	
4.02.02.1.01.0005	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	2	Rp 354.852.000	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	2	Rp 291.355.000	
4.02.02.1.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 3.056.011.634	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 3.441.313.654	
4.02.02.1.04.0002	Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	Rp 1.829.784.000	Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	Rp 2.036.912.654	
4.02.02.1.04.0008	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumen Dewan		Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	12	Rp 648.956.200	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	12	Rp 828.573.500	
4.02.02.1.04.0004	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7	Rp 209.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7	Rp 163.100.000	
4.02.02.1.04.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4	Rp 299.347.934	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4	Rp 342.000.000	
4.02.02.1.04.0007	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1	Rp 68.923.500	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1	Rp 70.727.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.02.1.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	Rp 2.962.730.000	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	Rp 3.064.063.900	
4.02.02.1.08.0001	Sub Kegiatan Kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	Rp 2.862.730.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	Rp 2.964.063.900	
4.02.02.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	Rp 100.000.000	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	Rp 4.385.696.305	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	Rp 4.719.193.000	Reses pada tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 3 kali
4.02.02.1.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	Rp 2.735.396.200	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	Rp 2.754.980.300	
4.02.02.1.02.0001	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	Rp 484.730.600	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	Rp 481.944.700	
4.02.02.1.02.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Rp 483.255.900	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Rp 480.010.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.02.1.02.0003	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	Rp 586.932.900	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	Rp 614.026.200	
4.02.02.1.02.0004	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2	Rp 570.171.300	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2	Rp 575.880.700	
4.02.02.1.02.0006	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	Rp 610.305.500	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	Rp 603.118.400	
4.02.02.1.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	Rp 762.677.800	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	Rp 664.872.700	
4.02.02.1.03.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	Rp 282.657.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	Rp 144.320.500	
4.02.02.2.02.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah	2	Rp 480.020.800	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah	2	Rp 520.552.200	
4.02.02.1.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	Rp 887.622.305	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	Rp 1.299.340.000	
4.02.02.1.05.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75	Rp 887.622.305	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75	Rp 1.299.340.000	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	Rp 20.534.270.196	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kab/Kota		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	Rp 19.353.431.189	Menyesuaikan Pagu Anggaran yang ada

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Rp 32.882.500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Rp 20.140.000	
4.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Rp 14.321.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Rp 6.202.800	
4.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12	Rp 18.561.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12	Rp 13.937.200	
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 2.915.088.981	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 3.319.039.781	
4.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Rp 2.915.088.981	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Rp 3.319.039.781	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Rp 438.083.100	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Rp 254.231.200	
4.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25	Rp 58.905.300	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25	Rp 55.584.000	
4.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	Rp 379.177.800	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	Rp 198.647.200	
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 712.121.620	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 732.169.700	
4.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22	Rp 40.125.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22	Rp 40.894.300	
4.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	58	Rp 95.944.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	58	Rp 92.155.500	
4.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	39	Rp 40.434.920	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	39	Rp 45.015.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Rp 126.425.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Rp 34.541.000	
4.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	48	Rp 28.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	48	Rp 28.800.000	
4.02.01.2.06.0008	Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp 196.422.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp 306.774.200	
4.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Rp 183.969.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Rp 183.989.000	
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	Rp 782.190.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	0	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	Rp -	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	0	
4.02.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan	25	Rp 163.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24	Rp 464.992.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	0	
4.02.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10	Rp 154.198.000	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Rp 1.047.000.502	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Rp 1.122.963.580	
4.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Rp 174.567.102	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Rp 196.996.080	
4.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Rp 872.433.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Rp 925.967.500	
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	Rp 1.179.789.500	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	Rp 718.488.100	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	Rp 395.753.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	Rp 395.611.100	
4.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89	Rp 181.376.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89	Rp 182.417.000	
4.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	Rp 572.660.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	Rp 125.460.000	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi dalam 1 tahun	76	Rp 30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi dalam 1 tahun	76	Rp 15.000.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	Rp 13.427.113.993	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	Rp 13.186.398.828	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun	25	Rp 12.946.917.993	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun	25	Rp 12.721.821.328	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun	14	Rp 405.196.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun	14	Rp 389.577.500	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun	25	Rp 75.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun	25	Rp 75.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya, pada Sekretariat DPRD Kota Blitar tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan kepada Sekretariat DPRD Kota Blitar, hal ini disebabkan karena Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2022 bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah. Untuk itu usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 sebagaimana berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pada Sekretariat DPRD Kota Blitar

No.	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	DIISI USULAN POKPIR / MUSRENBANG	DIISI PEMETAAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (APABILA DIAKOMODIR)	DIISI USULAN POKPIR / MUSRENBANG	DIISI INDIKATOR KINERJA OUTPUT ATAS USULAN POKPIR / MUSRENBANG	DIISI TARGET INDIKATOR KINERJA OUTPUT ATAS USULAN POKPIR / MUSRENBANG	DIISI KETERANGAN DIAKOMODIR / TIDAK DIAKOMODIR
		N I H I L				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Pada tahun 2025 ini mengangkat Tema Pembangunan : *Pemantapan Kesejahteraan melalui Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Berbasis Digital*.

Berdasarkan arah kebijakan nasional tahun 2025 dan guna mewujudkan Misi Kota Blitar dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar berkewajiban melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2025.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan dirumuskannya tujuan, maka Sekretariat DPRD Kota Blitar memiliki arah untuk melaksanakan rencana kerja dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya, sumber dana (anggaran) dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar utama dalam pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022-2026 adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

Untuk lebih jelasnya disajikan Tujuan dan Sasaran serta target capaian kinerja pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2025

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Restra	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tujuan: Meningkatnya kualitas fasilitas Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks Kualitas Fasilitas Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	80	80.5	81	81,5	82	82
	Sasaran : Meningkatnya fasilitas fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD	80	80.5	81	81,5	82	82
	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas fungsi pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	80	80.5	81	81,5	82	82
	Tujuan: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (85)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	A (86,5)
	Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (85)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	A (86,5)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

Program dan Kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada Sekretariat DPRD tahun 2025 relatif sama dengan tahun sebelumnya (tahun 2024) kecuali terkait orientasi anggota DPRD yang hanya dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada tahun 2024.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025, yaitu :

- a. RPJMD dan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
- b. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2024 adalah 2 program, 14 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Berikut uraian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdapat 8 (delapan) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdapat 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

- 5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- 6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Selanjutnya, dari program dan kegiatan – kegiatan diatas dapat diuraikan beserta sub kegiatan sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3. Tabel Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja Th. 2025	KETERANGAN
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	
4.02.02.1.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	
4.02.02.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	
4.02.02.1.01.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan	10	
4.02.02.1.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	
4.02.02.1.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2	
4.02.02.1.01.0005	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	2	
4.02.02.1.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	
4.02.02.1.04.0002	Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	
4.02.02.1.04.0008	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumen Dewan	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	12	
4.02.02.1.04.0004	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7	
4.02.02.1.04.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4	
4.02.02.1.04.0007	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1	
4.02.02.1.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	
4.02.02.1.08.0001	Sub Kegiatan Kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	
4.02.02.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja Th. 2025	KETERANGAN
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	
4.02.02.1.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	
4.02.02.1.02.0001	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	
4.02.02.1.02.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	
4.02.02.1.02.0003	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	
4.02.02.1.02.0004	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2	
4.02.02.1.02.0006	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	
4.02.02.1.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	
4.02.02.1.03.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	
4.02.02.2.02.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah	2	
4.02.02.1.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	
4.02.02.1.05.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencana an, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	
4.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	
4.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12	
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	
4.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminisitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	
4.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25	

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja Th. 2025	KETERANGAN
4.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	
4.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22	
4.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	58	
4.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	39	
4.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10	
4.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	48	
4.02.01.2.06.0008	Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	
4.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3	
4.02.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	25	
4.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24	
4.02.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10	
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	
4.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	
4.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	
4.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	
4.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89	
4.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja Th. 2025	KETERANGAN
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terehabilitasi dalam 1 tahun	76	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun	25	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun	14	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun	25	

Sumber pendanaan pagu indikatif Sekretariat DPRD Kota Blitar dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dirinci menjadi 2 Program dengan 3 indikator dengan disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 3.3.1 Tabel Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaannya

Kode	Program	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 8.631.529.554	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	Rp 4.719.193.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	Rp 19.528.431.189	Dana Alokasi Umum (DAU)
TOTAL PAGU INDIKATIF				Rp 32.879.153.743	Dana Alokasi Umum (DAU)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah.

A. Tabel Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fasilitasi DPRD	Melaksanakan Penyusunan rencana kerja DPRD sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD - Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	√		√
2	Meningkatkan kualitas kompetensi seluruh ASN guna meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme ASN serta peningkatan kapasitas DPRD	Melaksanakan dan meningkatkan kompetensi ASN dan DPRD dalam kegiatan Workshop, bimtek maupun capacity building	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi SKPD	√		√
		Melaksanakan dan meningkatkan kompetensi DPRD dalam kegiatan workshop, bimtek	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD - Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	√		√
	Meningkatkan dukungan tenaga ahli/pakar dalam fasilitasi pembentukan peraturan daerah	Melaksanakan kerjasama dengan tenaga ahli/pakar hukum atau akademisi dalam pendampingan pembahasan pembentukan peraturan daerah	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD - Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	√		√
		Melaksanakan pendampingan dengan tenaga ahli/pakar hukum atau akademisi dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	√		√
	Meningkatkan kualitas pelayanan	Melaksanakan dan memanfaatkan informasi dan data	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	√		√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
	pengelolaan produk hukum daerah	produk hukum daerah dalam aplikasi JDIH	- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan			
	Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dan DPRD dalam fasilitasi kordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Melaksanakan dan menjalin komunikasi yang baik antara DPRD dan Sekretariat DPRD	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD - Sub Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	√	√	√
	Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal antara sekretariat DPRD dengan DPRD serta mitra kerja OPD	Melaksanakan fasilitasi dan kordinasi dengan mitra kerja OPD	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	√		√
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD	Melaksanakan peningkatan sarana prasarana kantor dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	√	√	√

B. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025 adalah 2 program, 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Taju Tahun 2026
Sekretariat DPRD Kota Blitar

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar		Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD		Rp32.879.153.743	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar		Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD		Rp32.704.153.743
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	Rp 8.631.529.554	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	Rp 12.759.442.755
4.02.02.1.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar		100%	Rp 2.126.152.000	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar		100%	3.619.940.000,00
4.02.02.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		5	Rp 156.224.200	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		5	196.000.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.02.1.01.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan		10	Rp 1.483.178.800	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan		10	2.791.000.000,00
4.02.02.1.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan		1	Rp 120.394.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan		1	138.690.000,00
4.02.02.1.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi		2	Rp 75.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi		2	86.250.000,00
4.02.02.1.01.0005	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun		2	Rp 291.355.000	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun		2	408.000.000,00
4.02.02.1.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar		100%	Rp 3.441.313.654	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar		100%	3.432.363.255,00
4.02.02.1.04.0002	Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD		6	Rp 2.036.912.654	Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD		6	2.104.251.600,00
4.02.02.1.04.0008	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD		12	Rp 828.573.500	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD		12	746.299.630,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.02.1.04.0004	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli		7	Rp 163.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli		7	240.350.000,00
4.02.02.1.04.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD		4	Rp 342.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD		4	262.200.000,00
4.02.02.1.04.0007	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD		1	Rp 70.727.500	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD		1	79.262.025,00
4.02.02.1.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar		100%	Rp 3.064.063.900	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar		100%	5.707.139.500,00
4.02.02.1.08.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		12	Rp 2.964.063.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		12	5.592.139.500,00
4.02.02.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun		1	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun		1	115.000.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan		100%	Rp 4.719.193.000	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan		100%	Rp 5.043.550.751
4.02.02.1.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar		100%	Rp 2.754.980.300	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar		100%	3.145.705.630,00
4.02.02.1.02.0001	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS		2	Rp 481.944.700	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS		2	557.440.190,00
4.02.02.1.02.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2	Rp 480.010.300	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2	555.744.285,00
4.02.02.1.02.0003	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD		2	Rp 614.026.200	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD		2	1.020.765.651,00
4.02.02.1.02.0004	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan		2	Rp 575.880.700	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan		2	655.696.995,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.02.1.02.0006	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD		2	Rp 603.118.400	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD		2	701.851.325,00
4.02.02.1.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar		100%	Rp 664.872.700	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar		100%	877.079.470,00
4.02.02.1.03.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		12	Rp 144.320.500	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		12	325.055.550,00
4.02.02.2.02.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah		2	Rp 520.552.200	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah		2	552.023.920,00
4.02.02.1.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		100%	Rp 1.299.340.000	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		100%	1.020.765.651,00
4.02.02.1.05.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses		75	Rp 1.299.340.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses		75	1.020.765.651,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,5	Rp 19.528.431.189	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,5	Rp 25.162.039.094
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	Rp 20.140.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	37.850.000,00
4.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		7	Rp 6.202.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		7	16.500.000,00
4.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		12	Rp 13.937.200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		12	21.350.000,00
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100%	Rp 3.494.039.781	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100%	3.350.000.000,00
4.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25	Rp 3.494.039.781	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25	3.350.000.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan adminsitasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100%	Rp 254.231.200	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan adminsitasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100%	503.750.000,00
4.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		25	Rp 55.584.000	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		25	67.750.000,00
4.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		25	Rp 198.647.200	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		25	436.000.000,00
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100%	Rp 732.169.700	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100%	818.705.000,00
4.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		22	Rp 40.894.300	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		22	46.000.000,00
4.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		58	Rp 92.155.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		58	110.350.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		39	Rp 45.015.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		39	46.500.000,00
4.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		10	Rp 34.541.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		10	145.350.000,00
4.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan		48	Rp 28.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan		48	33.120.000,00
4.02.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu		12	Rp 306.774.200	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu		12	225.885.000,00
4.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	Rp 183.989.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	211.500.000,00
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan		0	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan		100%	2.449.744.500,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan		0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan		3	1.555.976.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan		0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan		25	181.700.000,00
4.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		24	534.740.800,00
4.02.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		0	0	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		10	177.327.700,00
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100%	Rp 1.122.963.580	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100%	1.204.050.577,00
4.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	Rp 196.996.080	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	200.752.167,00
4.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	Rp 925.967.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	1.003.298.410,00
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar		100%	Rp 718.488.100	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar		100%	1.356.757.925,00
4.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau		29	Rp 395.611.100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan Dinas		29	455.116.525,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
4.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		89	Rp 182.417.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		89	208.582.400,00
4.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		13	Rp 125.460.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		13	658.559.000,00
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi dalam 1 tahun		5	Rp 15.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi dalam 1 tahun		5	34.500.000,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100	Rp 13.186.398.828	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100%	15.441.181.092,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun		25	Rp 12.721.821.328	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun		25	14.888.955.692,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun		14	Rp 389.577.500	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun		14	465.975.400,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun		25	Rp 75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun		25	86.250.000,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Kota Blitar dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024.

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan hasil perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kota Blitar akan dilaksanakan secara terpadu dan sinkron antar kegiatan dengan kegiatan lain dalam satu program maupun kegiatan antar kegiatan pada program lain dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD Kota Blitar

Apabila dalam hal pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025 maka akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja

Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran maka Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya kegiatan.
3. Dilaksanakan Pemantauan/monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang semakin kompleks, maka perlu adanya rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang semakin kompleks melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kota Blitar.
2. Sebagai fasilitator maka Sekretariat DPRD akan mengintensifkan koordinasi dengan DPRD untuk menciptakan kesepahaman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga tercipta harmonisasi antara Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan DPRD Kota Blitar dalam mendukung dan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Rencana Kerja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan tetap berdoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Setelah ditetapkan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025, dan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga terwujud peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.